



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 138/KPTA.W6-A/TI1.1.1/1/2025

TENTANG

IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu melakukan inovasi utama yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dipandang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pembangunan Zona Integritas;
 - bahwa perkembangan informasi digunakan sebagai media untuk meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Peraturan Presiden RI. Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 071 Tahun 2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I.;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMENPAN RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG INOVASI PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- KEDUA : Memperhatikan perkembangan implementasi teknologi informasi yang semakin pesat dalam mempermudah pelaksanaan TUPOKSI dan semangat melakukan inovasi untuk pelayanan pada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

- KETIGA : Mengimplementasikan Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 sebagai berikut;
1. Propperading (Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Banding)
 2. E-Waskita (Aplikasi Elektronik Pengawasan Kinerja Satuan Kerja)
 3. Monsakip (Aplikasi Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 4. Teras PTA Palembang (Integrasi Aplikasi PTA Palembang)
 5. Batasa (Basis Data Terpusat)
 6. Prime Doc (Sistem Informasi Pengumpulan Dokumen Elektronik)
 7. SI-Cakep (Aplikasi Sistem Informasi Cuti Pegawai)
 8. Medli (Media Layanan Informasi)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Januari 2025
Ketua



H. M. SUTOMO